

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Kajian Pustaka

A.1. Pemahaman Agama

Pemahaman dalam kamus bahasa Indonesia memiliki kata dasar paham yang berarti mengerti, memahami, pandangan, faham atau aliran.¹⁶ Sedangkan agama menurut bahasa sansekerta terdiri dari dua kata yakni : “*a*” berarti tidak dan “*gama*” yang berarti kacau. Hal itu, mengandung pengertian manusia agar tidak kacau.¹⁷ Dan secara mendasar dan umum dapat didefinisikan sebagai, “Seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya”.¹⁸

Dewasa ini, dalam merumuskan definisi agama secara tepat, menurut para ilmuwan sosial sangat sulit. Yang menjadi masalah dalam merumuskan definisi agama tersebut pada penentuan dari batas-batas gejala itu dalam penempatannya.

¹⁶ Mangunswito., *Kamus Saku Bahasa Indonesia* (Jakarta : Widyatamma Pressindo, 2013)., hlm 372

¹⁷ Dadang Kahmad., *Sosiologi Agama* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006)., hlm 13.

¹⁸ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto., *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta : Kencana, 2013)., hlm. 248.

Adapun alasan menurut Mukti Ali mengapa para tokoh sosial sulit membuat definisi agama, yaitu :

1. Karena pengalaman agama adalah masalah bathin, subyektif dan individual. Tiap orang mengartikan agama sesuai dengan pengalamannya sendiri
2. Jika orang membicarakan agama biasanya penuh semangat dan emosional. Apalagi jika seseorang dikatakan tidak beragama maka kapasitas emosinya semakin tinggi, karena setiap orang ingin menyatakan dirinya sebagai manusia yang beragama
3. Konsepsi agama akan dipengaruhi oleh tujuan orang yang memberikan pengertian agama.¹⁹

Seperti yang dikemukakan oleh Roland Robertson : ada dua jenis utama definisi tentang agama yang telah diusulkan oleh ilmuwan sosial, yang inklusif dan yang eksklusif.²⁰

Definisi inklusif merumuskan agama dalam arti seluas-luasnya, yang memandangnya sebagai setiap sistem kepercayaan dan ritual yang diresapi dengan “kesucian” atau yang diorientasikan kepada “penderitaan manusia yang abadi”. Mereka yang menyukai pandangan inklusif pada umumnya melihat agama sebagai bukan saja sistem-sistem yang teistik yang diorganisasikan sekitar tentang kekuatan supernatural, tetapi juga berbagai sistem kepercayaan yang nonteistik seperti komunisme, humanisme, atau nasionalisme. Sedangkan definisi eksklusif sebaliknya, definisi ini membatasi

¹⁹ Hamzah Tualeka Zn., *Sosiologi Agama* (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2011)., hlm. 47-48

²⁰ Ishomudin., *Sosiologi Agama* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002)., hlm. 29

istilah agama itu pada sistem-sistem kepercayaan yang mempostulatkan eksistensi makhluk, kekuasaan, atau kekuatan supernatural.²¹

Dalam definisi tersebut sebenarnya, agama masih dilihat sebagai teks atau doktrin. Sehingga keterlibatannya manusia sebagai pendukung atau penganut agama tersebut masih tidak tampak tercakup di dalamnya. Oleh karena itu, masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan keagamaan baik individu maupun kelompok atau masyarakat, pengetahuan dan keyakinan keagamaan yang berbeda dari pengetahuan dan keyakinan lainnya yang dipunyai manusia manusia, peranan keyakinan keagamaan terhadap kehidupan duniawi dan sebaliknya, dan kelestarian serta perubahan-perubahan keyakinan keagamaan yang dipunyai manusia, tidak tercakup dalam definisi diatas.

Sedangkan, menurut Durkheim, definisi agama sebagai berikut :

“A religion is a unified systems of beliefs and practices relative to sacred things, that is to say, things set apart and forbidden-beliefs and practices which unite into a single moral community called a church, all those who adhere to them” (agama merupakan suatu sistem kepercayaan yang disatukan oleh praktik yang bertalian dengan hal-hal yang suci, yakni hal-hal yang dibolehkan dan dilarang- kepercayaan yang dan praktik-praktik yang mempersatukan suatu komunitas moral yang disebut gereja, semua mereka yang terpaut satu sama lain).²²

Bagi Durkheim karakteristik agama yang penting ialah bahwa agama itu diorientasikan kepada sesuatu yang dirumuskan oleh manusia sebagai suci atau sakti, yakni obyek referensi yang dihargai, dan lebih dahsyat.

²¹Ishomudin., *Sosiologi Agama* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002)., hlm. 29

²² J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto., *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta : Kencana, 2013)., hlm. 246

Sedangkan dalam Kamus Saku Bahasa Indonesia, agama adalah sebuah sistem, prinsip akidah atau kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban.²³ Adapun tiga pendapat yang dapat dijumpai berkenaan dengan arti harfiah kata agama itu. (1) mengartikan agama itu tidak kacau, (2) agama itu tidak pergi atau agama itu diwariskan dari turun-temurun, dan (3) agama itu jalan bepergian atau agama itu maksudnya sebagai jalan hidup manusia.

Selain itu, ada tokoh sosial lain yang mendefinisikan agama, yakni Geertz sebagai berikut:

“Agama adalah sistem lambang yang berfungsi menegakkan berbagai perasaan dan motivasi yang kuat, berjangkauan luas dan abadi pada manusia dengan merumuskan berbagai konsep mengenai keteraturan umum eksistensi, dan dengan menyelubungi konsepsi-konsepsi ini dengan sejenis tuangan faktualitas sehingga perasaan-perasaan dan motivasi-motivasi itu secara unik tanpa realistik”.²⁴

Untuk menambah wawasan pemahaman tentang batasan agama, berikut ini akan dijelaskan oleh pendapat dari para ahli tentang aspek-aspek dan variabel-variabel agama, yaitu :

- a. Menurut L. B. Brown ada lima variabel, yaitu :
 - 1) Praktek-praktek yang menggambarkan keadaan agama. Biasanya ditandai dengan pergi ke masjid untuk shalat, membaca al qur'an, pergi ke gereja untuk beribadah, dan lain-lain.
 - 2) Kesadaran tentang sesuatu yang transcendent yang dapat memberikan dasar yang kuat bagi kehidupan keagamaan.

²³Mangunsuwito., *Kamus Saku Bahasa Indonesia* (Jakarta : Widyatamma Pressindo, 2013)., hlm. 16

²⁴ Betty R. Scharf., *Sosiologi Agama* (Jakarta : Kencana, 2004)., hlm. 34

- 3) Keterkaitan dalam suatu lembaga keagamaan yang menyatakan diri sebagai suatu nilai, sikap dan kepercayaan.
 - 4) Renungan suci dan iman
 - 5) Persesuaian antara pemahaman dan tingkah laku pemeluk-pemeluk agama.
- b. Menurut Sartono Kartodirjo ada lima variabel, yaitu :
- 1) Dimensi pengalaman yang mencakup semua perasaan persepsi dan sensasi yang dialami waktu komunikasi dengan supernatural
 - 2) Dimensi ideologis yang mencakup kepercayaan.
 - 3) Dimensi ritual yang mencakup semua aktivitas keagamaan.
 - 4) Dimensi Intelektual yang berhubungan dengan pengetahuan agama.
 - 5) Dimensi konsekwensi yang mencakup semua aspek dari kepercayaan, perkataan, perbuatan dan sikap.
- c. Menurut Kuntjaraningrat ada empat dimensi, yaitu :
- 1) Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia menjadi religious
 - 2) Sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan tentang sesuatu yang ghaib.
 - 3) Sistem Upacara religius yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan,

- 4) Kelompok-kelompok religius atau kesatuan-kesatuan sosial yang menganut sistem upacara²⁵.

Selain itu, adapun beberapa fungsi dari agama secara rinci yang akan peneliti jelaskan guna memberikan pengetahuan atau wawasan yang lebih terperinci dari agama itu sendiri, sebagai berikut :

1. Agama mendasar perhatiannya pada sesuatu yang ada di luar jangkauan manusia yang melibatkan takdir dan kesejahteraan. Terhadap dunia di luar jangkauannya, manusia selain memberikan tanggapan serta menghubungkan dirinya, juga memberikan atau menyediakan bagi pemeluknya suatu dukungan, pelipur lara dan rekonsiliasi. Manusia membutuhkan dukungan moral di saat menghadapi ketidakpastian dan membutuhkan rekonsiliasi dengan masyarakat bila ditinggalkan dari tujuan dan norma-normanya. Karena gagal mengejar aspirasi, sebab dihadapkan dengan kekecewaan serta kebimbangan maka agama menyediakan sarana emosional penting yang membantu dalam menghadapi unsur-unsur kondisi manusia tersebut. Dalam memberi dukungannya, agama menopang nilai-nilai dan tujuan yang telah terbentuk, memperkuat moral dan membantu mengurangi kebencian.
2. Agama menawarkan suatu hubungan transendental melalui pemujaan dan upacara ibadah, sehingga memberikan dasar emosional bagi rasa aman baru dan identitas yang lebih kuat di tengah ketidakpastian dan ketidakberdayaan kondisi manusia dari arus

²⁵ Hamzah Tualeka Zn., Sosiologi Agama (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2011)., hlm. 49-50

perubahan sejarah. Melalui ajaran-ajaran yang otoritatif tentang kepercayaan dan nilai, agama memberikan kerangka acuan di tengah pertikaian dan kekaburan pendapat serta sudut pandangan manusia.

3. Agama menyucikan norma-norma dan nilai masyarakat yang telah terbentuk, mempertahankan dominasi tujuan kelompok di atas keinginan individu, dan disiplin kelompok di atas dorongan hati individu. Dengan demikian, agama memperkuat legitimasi pembagian fungsi, fasilitas dan ganjaran yang merupakan ciri khas suatu masyarakat. Selain itu agama juga menangani keterasingan dan kesalahan individu yang menyimpang.
4. Agama juga melakukan fungsi yang bisa bertentangan dengan fungsi sebelumnya. Agama dapat memberikan standard nilai dalam arti bahwa norma-norma yang sudah terlembaga dapat dikaji kembali secara kritis dan kebetulan pada saat itu masyarakat memang sedang membutuhkannya. Hal ini mungkin benar, khususnya dalam hubungannya dengan agama yang menitikberatkan pada transendensi Tuhan, dan konsekuensi superioritasnya dan kemerdekaan masyarakat yang mapan. Oleh karena itu, kita menanamkan fungsi ini sebagai fungsi risalah atau nubuat. Fungsi risalah ini seringkali merupakan sumber protes sosial yang penting untuk melawan norma dan kondisi yang telah mapan.
5. Agama melakukan fungsi-fungsi identitas yang sangat penting. Dengan menerima nilai-nilai yang terkandung dalam agama dan kepercayaan-

kepercayaan tentang hakikat dan takdir manusia, individu mengembangkan aspek penting tentang pemahaman diri dan batasan diri. Melalui peran serta manusia di dalam ritual keagamaan dan doa, mereka juga melakukan unsur-unsur signifikan yang ada dalam identitasnya.

A.2. Kontrol Sosial

Kontrol sosial merupakan konsep yang sangat penting dalam hubungannya dengan norma-norma sosial. Norma-norma sosial di dalam dirinya telah mengandung harapan-harapan dan sebagai standar perilaku, maka diharapkan agar warga masyarakat dapat berperilaku sesuai (*conform*) dengan norma-norma sosial.

Pada dasarnya Kontrol sosial dapat diartikan sebagai pengawasan atau pengendalian sosial. Menurut Soerjono Soekanto, Kontrol sosial atau pengendalian sosial ini memiliki definisi yang luas, “sebagai suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.”²⁶ Sementara itu, menurut Peter L. Berger kontrol sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang.²⁷

²⁶ Soerjono Soekanto., *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012)., hlm. 179

²⁷ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto., *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta : Kencana, 2013)., hlm. 132.

Salah satu faktor yang mempertimbangkan alasan mengapa warga masyarakat perlu dikontrol di dalam kehidupan sehari-hari ada kaitannya dengan efektivitas atau tidaknya proses sosialisasi.

Proses sosialisasi secara normatif, tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, dalam arti mewujudkan tertib sosial, akan tetapi juga mendatangkan manfaat bagi warga masyarakat secara individual. Melalui proses-proses sosialisasi inilah warga-warga masyarakat dapat belajar bagaimana bertingkah pekerti dan menyesuaikan diri di dalam masyarakat tanpa menemui kesulitan.

Norma-norma merupakan petunjuk dan pedoman mengenai bagaimana caranya dan baaimana sebaiknya, menyelesaikan urusan-urusan hidup di dalam masyarakat ini. Ada berbagai jenis norma-norma sosial, yang tak selamanya dapat mudah dibedakan satu sama lain. Oleh karena itu, usaha-usaha mengadakan klasifikasi yang sistematis sangatlah sukar. Satu diantara usaha-usaha ini mencoba membedakan norma-norma sosial disokong oleh sanksi-sanksi yang tidak seberapa berat serta tidak mengancam ancaman-ancaman fisik, sedangkan satu golongan lagi berlaku dengan sokongan-sokongan sanksi-sanksi yang berat serta disertai dengan ancaman-ancaman fisik. Salah satu cara klasifikasi kasar-kasaran yang digolongkan oleh para sosiolog umumnya adalah sebagai berikut :

1. Kebiasaan (*Folkways*)

Menurut arti kata-katanya, *folkways* itu berarti tata cara (*ways*) yang lazim dikerjakan atau diikuti oleh rakyat kebanyakan (*folk*). Di

dalam literature-literatur sosiologi, *folkways* dimaksudkan untuk menyebutkan seluruh norma-norma sosial yang terlahir dari adanya pola-pola perilaku yang selalu diikuti oleh orang-orang kebanyakan, di dalam hidup mereka sehari-harinya, karena dipandang sebagai suatu hal yang lazim. Demikianlah, walaupun *folkways* itu semula memang merupakan suatu kebiasaan dan kelaziman belaka (sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang dan ajeg di dalam realita), namun karena dikerjakan secara berulang-ulang, maka berangsur-angsur terasa kekuatannya sebagai hal yang bersifat standard, yang karenanya, secara normatif dan wajib dijalani.²⁸

2. Tata Kelakuan (*Mores*)

Dibandingkan dengan norma-norma *folkways* yang biasanya dipandang relatif kurang begitu penting, dan oleh karena itu dipertahankan oleh ancaman-ancaman sanksi yang tidak seberapa keras, maka apa yang disebut *mores* itu dipandang lebih esensial bagi terjaminnya kesejahteraan masyarakat.

Kesamaan *mores* dan *folkways* terletak pada kenyataan bahwa kedua-duanya tidak jelas asal-usulnya, terjadi tidak terencana. Dasar eksistensinya pun tidak pernah dibantah, dan kelangsungannya, karena didukung tradisi, relative amatlah besar. Kesamaan lain ialah bahwa kedua-duanya dipertahankan oleh sanksi-sanksi yang bersifat informal dan komunal, berupa sanksi spontan dari kelompok-kelompok sosial di

²⁸²⁸ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto., *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta : Kencana, 2013)., hlm.48

mana kaidah-kaidah tersebut hidup. Walaupun ada kesamaan antara *folkways* dengan *mores*, namun *mores* selalu lebih dipandang sebagai bagian dari hakikat kebenaran. *Mores* adalah segala norma yang secara moral dipandang benar. Pelanggaran terhadap *mores* selalu dikutuk sebagai sesuatu hal yang secara moral tidak dapat dibenarkan. *Mores* tidak memerlukan dasar pembenaran, karena *mores* itu sendiri ialah sesuatu yang sungguh-sungguh telah bernilai benar.

Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan ini sangat penting karena memiliki alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Tata kelakuan memberikan batass-batas pada perilaku individu
- b. Tata kelakuan mengidentifikasi individu dengan kelompoknya.
- c. Tata kelakuan menjaga solidaritas antaranggota masyarakat.

3. Cara (*Usage*)

Cara (*usage*) lebih menonjol di dalam hubungan antar individu di dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadap *usage* tidak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.²⁹

²⁹ Soerjono Soekanto., Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012)., hlm. 174

4. Nilai (*Value*)

Menurut Horton dan Hunt (1987), nilai adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman itu berarti atau tidak berarti. Nilai pada hakikatnya mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang, tetapi ia tidak menghakimi apakah sebuah perilaku tertentu itu salah atau benar.³⁰

Nilai adalah suatu bagian penting dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah, artinya secara moral dapat diterima, kalau harmonis dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat dimana tindakan itu dilakukan. Ketika nilai yang berlaku menyatakan bahwa kesalehan beribadah adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi, maka bila ada orang yang malas beribadah tentu akan menjadi bahan pergunjangan.

5. Adat-Istiadat (*custom*)

Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan yang mengikatnya menjadi *custom* atau adat istiadat. Anggota masyarakat yang melanggar adat-istiadat, akan menderita sanksi yang keras yang kadang-kadang secara tidak langsung diperlakukan.³¹

³⁰ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto., Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan (Jakarta : Kencana, 2013)., hlm.55

³¹ Soerjono Soekanto., Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012)., hlm. 176

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat berperilaku menyimpang dari norma yang berlaku adalah sebagai berikut

1. Karena kaidah-kaidah yang ada tidak memuaskan bagi pihak tertentu atau karena tidak memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Karena kaidah yang ada kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan aneka penafsiran dan penerapan.
3. Karena didalam masyarakat terjadi konflik antara peranan-peranan yang dipegang warga masyarakat.
4. Karena memang tidak mungkin untuk mengatur semua kepentingan warga masyarakat secara merata.³²

Di dalam kontrol sosial, untuk mengendalikan tingkah pekerti warga masyarakat agar selalu konform dengan keharusan-keharusan norma, hampir selalu dijalankan dengan bersarankan kekuatan sanksi. Adapun sanksi yang dimaksud ialah sesuatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan oleh masyarakat kepada seseorang warga masyarakat yang terbukti melanggar atau menyimpangi keharusan norma sosial, dengan tujuan agar warga masyarakat ini kelak tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma tersebut.³³

Ada tiga jenis sanksi yang digunakan di dalam usaha-usaha pelaksanaan kontrol sosial ini, yaitu :

³² J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto., *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta : Kencana, 2013)., hlm.134

³³ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto., *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta : Kencana, 2013)., hlm. 135

1. Sanksi yang bersifat Fisik,

Sanksi fisik adalah sanksi yang mengakibatkan penderitaan fisik pada mereka yang dibebani sanksi tersebut, misalnya didera, dipenjara, diikat, dijemur dipanas matahari, tidak diberi makan dan sebagainya.

2. Sanksi yang bersifat Psikologik

Pada sanksi psikologik ini berbeda dengan sanksi fisik. Pada sanksi psikologik ini beban penderitaan yang dikenakan pada si pelanggar norma itu bersifat kejiwaan, dan mengenai perasaan, misalnya hukuman dipermalukan di muka umum, diumumkan segala kejahatan yang telah ia perbuat, dicopot tanda kepangkatan di dalam suatu upacara, dan lain sebagainya.

3. Sanksi yang bersifat Ekonomik

Pada sanksi ekonomik ini, beban penderitannya dikenakan kepada pelanggar norma adalah berupa pengurangan kekayaan atau potensi ekonomiknya, misalnya pengenaan denda, penyitaan harta kekayaan, dipaksa membayar ganti rugi, dan sebagainya.³⁴

Pada praktiknya, ketiga jenis sanksi tersebut diatas itu seringkali terpaksa dilakukan secara bersamaan tanpa bisa dipisah-pisahkan. Demikianlah misalnya kalau seorang hakim menjatuhkan pidana penjara kepada seorang terdakwa, ini berarti bahwa sekaligus terdakwa tersebut dikenai sanksi fisik (karena dirampas kebebasan fisiknya),

³⁴ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto., Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan (Jakarta : Kencana, 2013)., hlm. 135-136

sanksipsikologik (karena terasakannya olehnya perasaan aib dan malu menjadi orang hukuman), dan sanksi ekonomik (karena dilenyapkan kesempatan meneruskan pekerjaannya guna menghasilkan uang dan kekayaan).

Sementara itu, untuk mengusahakan terjadinya konformitas, kontrol sosial sesungguhnya juga dilaksanakan dengan menggunakan *incentive-incentive positif*. *Incentive* adalah dorongan positif yang akan membantu individu-individu untuk segera meninggalkan pekerti-pekertinya yang salah. Sebagaimana halnya dengan sanksi-sanksi, pun *incentive* itu bisa dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Incentive yang bersifat fisik
2. Incentive yang bersifat psikologik
3. Incentive yang bersifat ekonomik³⁵

B. Kerangka Teoretik

Emile Durkheim mengembangkan konsep masalah pokok sosiologi menjadi penting dan kemudian diujinya melalui studi empiris. Secara singkat, Pokok bahasan dari sosiologi adalah studi atas fakta sosial. Fakta sosial didefenisikan sebagai: seluruh cara bertindak, baku maupun tidak, yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal; atau bisa juga dikatakan bahwa fakta sosial adalah seluruh cara bertindak yang umum dipakai suatu masyarakat, dan pada saat yang sama keberadaannya terlepas dari manifestasi-manifestasi individual. Asumsi dasar dari pendefinisian Durkheim tersebut adalah bahwa gejala sosial itu riil dan mempengaruhi kesadaran

³⁵ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto., *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta : Kencana, 2013)., hlm. 137

individu serta perilakunya. Gejala sosial (seperti aturan legal, beban moral, bahasa dan konsensus sosial) sebagai sesuatu yang riil/faktual, maka gejala-gejala tersebut dapat dipelajari dengan metode-metode empirik. Oleh sebab itu, dimungkinkan untuk dikembangkannya metode keilmuan dengan gejala/fakta sosial sebagai objek material ilmu tersebut, yaitu ilmu sosiologi.

Durkheim membedakan dua tipe ranah fakta sosial, yakni fakta sosial material dan fakta sosial non material, yakni :

1. **Pertama**, fakta sosial material, seperti gaya arsitektur, bentuk teknologi, serta hukum dan perundang-undangan, mempunyai kecenderungan untuk lebih mudah dipahami karena dapat diamati secara langsung.
2. **Kedua**, fakta sosial nonmaterial, merupakan kekuatan moral, seperti nilai dan norma. Meskipun fakta sosial ini bersifat individual (internal) namun dalam interaksi-interaksi individu (masyarakat) maka bentuk dan substansi fakta sosial nonmaterial ini akan “mematuhi” dan tunduk pada interaksi tersebut, bukan oleh individu per individu (pada titik inilah fakta sosial bersifat eksternal).

Durkheim memberikan perhatian yang besar terhadap fakta sosial nonmaterial. Fakta sosial nonmaterial ini terdiri dari, paling kurang, empat jenis, yakni :

1. **Moralitas** : Moralitas sebagai fakta sosial tidak terlepas dari masyarakat. Pada konteks hidupnya, Durkheim menilai bahwa masyarakat terancam kehilangan ikatan moral (ini disebut “patologi”). Hal ini dimungkinkan karena setiap individu memiliki kecenderungan untuk memuaskan nafsu

kegilaan untuk mencapai kepuasan (setiap manusia ingin lebih). Tanpa ikatan moral (moralitas kolektif) maka individu-individu akan menjadi budak dari kesenangan yang selalu meminta lebih.

2. kesadaran kolektif : Moralitas kolektif dapat tercapai melalui fakta sosial nonmaterial lainnya, seperti kesadaran kolektif yang merujuk pada struktur umum pengertian, norma, dan kepercayaan bersama, kesadaran kolektif ini bersifat terbuka dan dinamis.
3. representasi kolektif : Representasi kolektif, dimengerti sebagai gagasan/ daya sosial yang memaksa individu, seperti simbol agama, mitos, dan legenda populer. Sehingga, hal tersebut Emile Durkheim dapat melihat bahwa semua agama membedakan antara hal-hal yang dianggap sacral maupun profane. Hal mana merupakan cara individu merepresentasikan kepercayaan, norma, dan nilai kolektif.
4. arus sosial : Menurut Durkheim, arus sosial merupakan fakta sosial yang tidak menghadirkan diri dalam bentuk yang jelas. Durkheim mencontohkan dengan “dengan luapan semangat, amarah, dan rasa kasihan” yang terbentuk dalam kumpulan publik.
5. Pikiran Kelompok : Durkheim menyatakan bahwa pikiran kolektif sebenarnya adalah kumpulan pikiran individu. Akan tetapi pikiran individual tidak secara mekanis saling bersinggungan dan tertutup satu sama lain. Pikiran-pikiran individual terus-menerus berinteraksi melalui pertukaran simbol: mereka mengelompokkan diri berdasarkan hubungan alami mereka, mereka menyusun dan mengatur diri mereka sendiri. Dalam

hal ini terbentuklah suatu hal baru yang murni bersifat psikologis, hal yang tak ada bandingannya di dunia biasa.

Dari teori dan asumsi Durkheim tentang fakta sosial, peneliti memilih kajian fakta sosial non material sebagai bahan untuk menganalisis penelitian tentang pengaruh Pemahaman Agama terhadap kontrol sosial pada masyarakat desa Pajaran, kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

Dewasa ini, semua para tokoh sosial selama ini semuanya mencari asal-usul agama dalam pengalaman pribadi manusia. Mereka berasumsi bahwa kepercayaan-kepercayaan dalam masyarakat purba secara sadar dirumuskan oleh orang yang memiliki daya berfikir *relative* tinggi (*primitive philosopher*), untuk menjelaskan pengalaman-pengalaman setiap manusia. Ia memandang agama sebagai fenomena sosial, dan mencari sebab-sebabnya dalam masyarakat sendiri, tidak dalam pengalaman-pengalaman individu.

Di dalam bukunya Emile Durkheim yang berjudul “*Les Formes Elementaires De La Vie Religion*” (bentuk-bentuk awal kehidupan agama) pada tahun 1912, beliau melihat bahwa semua agama membedakan antara hal-hal yang dianggap sakral dan yang dianggap profan. Yang sakral adalah hal-hal yang dipisahkan daripada yang lain dan yang dilarang. Sakral bisa mempunyai konotasi “suci” bisa juga berarti “berbahaya, terlarang”.³⁶

Dalam hal ini, Durkheim menawarkan definisi agama sebagai berikut :

“A religion is a unified systems of beliefs and practices relative to sacred things, that is to say, things set apart and forbidden-beliefs and practices which unite into a single moral community called a church, all those who

³⁶ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto., Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan (Jakarta : Kencana, 2013)., hlm. 246.

adhere to them” (agama merupakan suatu sistem kepercayaan yang disatukan oleh praktik yang bertalian dengan hal-hal yang suci, yakni hal-hal yang dibolehkan dan dilarang- kepercayaan yang dan praktik-praktik yang mempersatukan suatu komunitas moral yang disebut gereja, semua mereka yang terpaut satu sama lain).³⁷

Dengan kata lain masyarakat yang tidak ingin terpecah memerlukan agama. Walaupun Emile Durkheime sendiri merupakan seorang tokoh sosial yang menganut paham Atheis, namun karyanya mampu memberikan sumbangan positif agama terhadap kesehatan masyarakat.

Seperti halnya Frazer yang melalui karyanya *The Golden Bough* yang terbit pada tahun 1890, banyak membicarakan tentang magi dan religi, dan magi sebagai suatu tahap kepercayaan dan praktik sebelum munculnya religi/agama.³⁸ Durkheime pun juga memberikan perbedaan tajam antara magi dan religi. Namun letak perbedaan itu juga dilihat dari sudut sosiologis; religi adalah kolektif sedangkan magi adalah individual (tidak ada umat magi). Ritual religi adalah berkaitan dengan sesuatu yang sakral, sedangkan ritual magi seringkali mengingkari, menolak, memprofankan, malahan meledek yang sakral. Melanggar larangan religius maupun magi menyebabkan hukuman; namun dalam hal magi hukuman itu menyusul otomatis, dan tidak ditambah dengan hukuman oleh masyarakat. Dalam religi, hukuman itu adalah dua; yang satu oleh Tuhan atau kekuatan gaib yang diimani, yang kedua oleh masyarakat. Dalam magi tidak ada konsepsi dosa, kalau larangan magi (misalnya pantangan) dilanggar, maka masyarakat tidak peduli akibat buruk yang dipercayai adalah pribadi saja. (Lukes,

³⁷ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto., *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta : Kencana, 2013)., hlm. 246

³⁸ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto., *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta : Kencana, 2013)., hlm. 245-246

1988 dalam bukunya Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto).³⁹

C. Hasil Penelitian Terdahulu yang relevan

1. Hubungan Tingkat Religiusitas dengan *Self Regulation* Mahasiswa Universitas Yudharta Pasuruan (Nur Afida/B07205010, Program Studi Psikologi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009)

Tingkat religiusitas adalah kualitas atau kapasitas penghayatan agama seseorang yang menyangkut symbol, keyakinan, nilai dan perilaku yang didorong oleh kekuatan spiritual. Sedangkan yang dimaksud dengan self regulation di sini adalah penggunaan suatu proses yang mengaktivasi pemikiran, perilaku, dan affects (perasaan) yang terus menerus dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil uji kendall's Tau-b tersebut juga telah diperoleh harga koefisien korelasi sebesar 0.360, dengan taraf signifikan sebesar 0.000. Karena signifikansi < 0.05 , maka ada hubungan yang signifikan antara tingkat religiusitas dengan self regulation mahasiswa Universitas Yudharta Pasuruan. Sedangkan jika dilihat dari harga Z hitung yang lebih besar dari Z table (yakni : $5.0410 > 1.96$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kenyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa koefisien korelasi telah dinyatakan signifikan.

³⁹ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto., Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan (Jakarta : Kencana, 2013)., hlm. 247.

Dengan demikian, adanya hubungan antara tingkat religiusitas dengan self regulation mahasiswa Universitas Yudharta Pasuruan sudah terbukti dengan harga yang sangat signifikan. Dengan mencermati hasil interpretasi dari beberapa teknik uji analisa data yang telah diterapkan, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum nilai taraf signifikansi hubungan tingkat religiusitas dengan self regulation yang terdapat dalam diri mahasiswa Yudharta Pasuruan, baik mereka yang tinggal di pondok pesantren, maupun kost-kostan atau kontrakan yang terdapat di sekitar kampus adalah bersifat positif (+). Sehingga dengan demikian, sangat mudah sebetulnya bagi para mahasiswa tersebut untuk bisa menyeimbangkan potensi mereka sebagai pribadi-pribadi yang religius sekaligus memiliki kedisiplinan terhadap eksistensinya, baik dalam kegiatan yang bersifat individu, komunal pesantren dan kampus maupun di tengah rutinitas masyarakat yang menuntut pengabdian setiap orang. Paradigma ini tetap harus diwujudkan karena dalam penelitian ini sudah terbukti bahwa tingkat religiusitas yang tinggi, dengan sendirinya akan menambah kemampuan self regulation seseorang.

2. Pengaruh Tingkat Religiusitas Terhadap Perilaku Prosocial Pada Remaja Di Marasah Aliyah Negeri II Tulungagung (Uswatun Hasanah/B07302072, Program Studi Psikologi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).

Tingkat religiusitas adalah kadar atau tingkat keterkaitan manusia terhadap agamanya. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang

lebih besar maka akan menjalankan aturan-aturan dan kewajiban agamanya dengan patuh.

Sedangkan, Perilaku Prososial merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain tanpa memperdulikan motif-motif dari penolong. Dan perilaku prososial ini menjadi bagian dari aturan atau norma sosial.

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara tingkat religiusitas dengan perilaku prososial remaja di Madrasah Aliyah Negeri II Tulungagung. Dengan asumsi, semakin tinggi pengaruhnya terhadap perilaku prososial pada remaja. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat religiusitas maka semakin rendah pula perilaku prososialnya.

Oleh karena itu, dari dua penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa keterkaitan penelitian saya dengan penelitian terdahulu, yaitu dari segi persamaannya adalah sama-sama membahas tentang hubungan religious dengan perilaku seseorang, dan juga metode penelitiannya. Namun, yang membedakannya dengan penelitian yang lain yaitu objek penelitian. Untuk yang penelitian terdahulu hanya membahas sebatas individu saja, namun dalam penelitian yang saya lakukan ini lebih mengarah kepada sekelompok orang (komunitas) di desa Pajaran, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari kerangka teoritik diatas, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Hipotesis Nihil (H_0) yang berbunyi :

Tidak ada hubungan antara pemahaman agama terhadap control sosial pada masyarakat desa Pajaran, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan.

2. Hipotesis Alternatif (H_a) yang berbunyi :

Ada hubungan antara pemahaman agama terhadap kontrol sosial pada masyarakat desa Pajaran, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan.